

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN
WARA UTARA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi
syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOM DAN BISNI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2023

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN
NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN
WARA UTARA KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Palopo*



Jibria Ratna Yasir, SE.,M.Si

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOM DAN BISNI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hiqma
NIM : 17 0401 0062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan /karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



NUR HIQMA
NIM. 17 0401 0062

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang ditulis oleh Nur Hiqma Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0062 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 19 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 29 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Penguji I | () |
| 4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy | Penguji II | () |
| 5. Jibril Ratna Yasir, S.E., M.Si | Pembimbing | () |

Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP.19820124 200901 2 006



Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP.4890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo” dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta, ayahanda Syaipulla, ibunda Nurlia yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasihat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepan. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moral maupun material. Penulis sadar tidak

mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

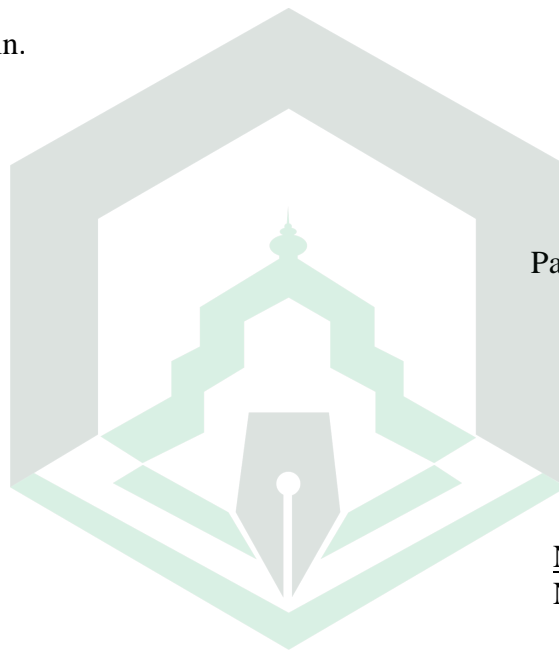
1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag beserta Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Muhaemin, M.A serta Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI., Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Muhammad Ilyas, S.Ag., MA. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Muhammad Alwi, S.sy., M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah para dosen, beserta staf yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Ibu Jibria Ratna Yasir, S.E.,M.Si selaku pembimbing yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu dan meluangkan waktu demi memberikan

bimbingan, arahan serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI selaku penguji I dan ibu Hamida, S.E,Sy.,M.E.Sy selaku penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Akbar Sabani, S.EI., M.E., selaku Dosen Penasehat Akademik kelas Ekis B yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ketahap penyelesaian studi.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayah dan Ibu yang telah mengasuh, mendoakan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa sampai ketahap sekarang ini.
9. Hj. Nurlaeli, S.Pt.,MP selaku Kepala Badan Dinas Perikanan Dan Kelautan, dan Muh. Asri Yusuf, S.Sosselaku Kepala Kelurahan telah berperan penting karena telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Kepada saudara-saudariku, Sahrul, Putri, Andi Saputra, Rahmat, Nur Yanti, Satria, Nur Aini, dan Muh. Syarif selama ini membantu dan mendoakanku serta memberikan semangat semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan.

11. Kepada Sahabatku tercinta (Rezki Wahyuni partner terbaikku dari SMK hingga saat ini. Terima kasih banyak-banyak selalu membantu dan mendoakan penulis dalam setiap hal), dan terima kasih kepada sahabat Nurul Qomaria Syarif dan Andriana yang penulis kenal dari rezki wahyuni yang sedang berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan perkuliahan akhir.
12. Kepada semua teman seperjuangan, Ekonomi Syariah Ekis B angkatan 2017 (khususnya temanku Sarsena yang berjuang diakhir bersamaku hingga selesai, terima kasih banyak), yang selama ini membantu dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat ku semua yang masih berjuang tetap semangat dan jangan putus asa yah ingat dan yakinlah kepada Allah setiap kesulitan pasti ada kemudahan, penulis percaya jika kita terus berusaha maka akan ada jalan, walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi percayalah Allah tidak akan menguji hambaNya diluar batas kemampuannya.
14. Terakhir, untuk diri sendiri terima kasih sudah berusaha, bertahan, bangkit dan berjuang hingga akhir, dan Maaf karena kemarin pernah menyerah dan putus asa sebab bingung mau mulai darimana hal yang sudah terlewat jauh dari teman-teman seperjuangan, namun Allah sangat baik hingga membangkitkan semangat penulis untuk terus maju dan berjuang di akhir ini, walaupun lambat tapi penulis percaya apapun yang terjadi kemarin adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya agar mampu dan kuat menjalani fase-fase kehidupan dengan sabar dan ikhlas.

Semoga setiap bantuan doa dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, peneliti menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT, menuntun kearah yang benar dan lurus Aamiin.



Palopo, 19 Juni 2023

Penulis

Nur Hiqma
Nim. 17 0401 0062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ

:*kaifa*

هَوْلَ

:*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

: māta

رَمَى

: rāmā

قِيلَ

: qīla

يَمُوتُ

: yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّق	: <i>al-haqq</i>
نُعِمِّم	: <i>nu'imm</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*),

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ
dīnullāh *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

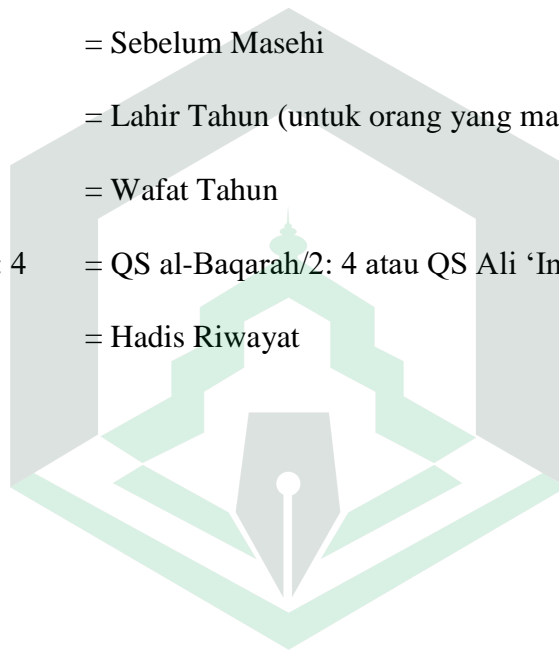
Jika namaresmiseseorangmenggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATANNYA	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
1. Peran Pemerintah	13
2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	18
3. Wilayah Pesisir	24
4. Masyarakat Pesisir	28
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Definisi Istilah	36
D. Desain Penelitian	37
E. Data dan Sumber Data	37
F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	40
I. Teknik Analisis Data	41
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan	56

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat

Q.S. Al-Qasas ayat 77	3
Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10	19



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil PerikananTangkap Kota Palopo (ton).....	6
Tabel 4.1 Jumlahpenduduk pada tahun 2022.....	45
Tabel 4.2 Pelatihan Masyarakat Wilayah Pesisir.....	53
Tabel 4.3 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kota Palopo.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Kelurahan Penggoli	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing

Lampiran 7 Nota Dinas Tim Verivifikasi/Turnitin

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim penguji

Lampiran 9 Hasil Cek Turnitin

Lampiran 10 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nur Hiqma, 2023. “*Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo*” Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si

Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Badan Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Kelurahan Penggoli dan masyarakat pesisir.

Adapun hasil penelitian adalah, Peran pemerintah terhadap pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yaitu, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan baik melalui pemberian bantuan peralatan penangkapan ikan, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir dan lain sebagainya. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan yang ada di wilayah pesisir. Hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo adalah yang pertamarendahnya kualitas sumber daya manusia dimana banyak diantara masyarakat pesisir yang tidak berpendidikan atau hanya tamatan SD saja kemudian yang kedua keterbatasan anggaran dimana Pemerintah tidak memberikan menyeluruh bantuan untuk para nelayan karena anggaran yang dimiliki tidak dapat mencakup semua nelayan yang ada di Kota Palopo.

Kata Kunci : Peran pemerintah, pemberdayaan nelayan, wilayah pesisir

ABSTRACT

Nur Hiqma, 2023 “The Government’s Role In Empowering Fishermen In The Coastal Area Of North Wara District, Palopo City” Sharia Economics Study Program, Fakultas Of Economics And Islamic Business State Islamic Institute (Iain) Palopo. Supervised By Jibria Ratna Yasir, S.E,M.Si

This research discusses the role of Government in empowering fishermen in the coastal area of north wara district, Palopo City.

Data collection method is interview abservation. The informant in this research was the head of the fisheries and maritime affairs agency. Head of penggoli subdistrict and coastal communities.

The results of the research are, the role of the Government in empowering fishermen in the coastal areas of north wara district, palopo city, namely, the Government has made various efforts to improve the welfare of fishing communities, both through providing assistance with fishing equipmen, easy acces to capital, as well as through coastal community empowerment program and so on. Where all of these programs aim to improve the welfare of coastal communities, including fishermen in coastal areas. The obstacles fased by the Government in empowering fisherment in coastal areas. North Wara District, Palopo City, are the first, low quality of human resources where many coastal communities are not educated or only elementary school graduates, then the second is budget limitations where to fishermen because the budget cannot cover all fishermen in palopo city.

Keywords: goverment role, fishermenempowerment, coastal areas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu fungsi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankannya adalah berbagai inovasi. Inovasi tersebut didorong oleh sumber daya manusia, sedangkan sumber daya alam digunakan sebagai pendukung. Inovasi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan kemandirian. Pengaturan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dimanfaatkan dalam fungsi pemberdayaan yang dilaksanakan.¹

Pemberdayaan masyarakat, sebagaimana didefinisikan oleh Damanhuri, D. dan L. Arianto diartikan sebagai upaya menjadikan masyarakat mandiri melalui perwujudan potensi bakat yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Terkait pemberdayaan masyarakat, selalu ada dua kelompok yang berbeda namun saling berhubungan. Pertama, ada masyarakat itu sendiri yang berperan sebagai pihak yang diberdayakan, kemudian ada pihak yang merawat pihak yang memberdayakan.²

Memberdayakan orang adalah sarana dan tujuan. Ketika kita berbicara tentang "pemberdayaan", yang kita maksud adalah sebuah proses yang melibatkan sejumlah langkah yang diambil untuk memperbaiki kehidupan

¹Fahmi Arumsi Dalam Ini'matul Huda "Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia, 2012, 28

²Damanhuri, D. Dan L. Arianto, 1995, *Dimensi Sosial Ekonomi Dalam Kerangka Pembangunan Masyarakat Pesisir, Makalah Pertemuan Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 143

orang-orang yang terpinggirkan, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Kepercayaan diri, kemampuan untuk mengartikulasikan tujuan, sarana pendukung secara finansial dan sosial, dan kebebasan untuk mengejar minat dan hasrat pribadi adalah ciri khas kehidupan individu yang berdaya. Dalam konteks transformasi sosial, pemberdayaan mengacu pada hasil atau kondisi yang diinginkan. Secara khusus, orang yang diberdayakan memiliki sumber daya mental dan fisik untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka sendiri.³

Pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi sangat penting karena mata pencaharian masyarakat tersebut secara langsung bergantung pada hasil laut. Mereka yang tinggal di daerah yang dekat dengan badan air atau pelabuhan yang mengandalkan penangkapan ikan baik sebagai mata pencaharian utama atau sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai anggota masyarakat nelayan. Bahkan, ada kalanya masyarakat menjadikan kegiatan penangkapan ikan sebagai sumber penghasilan utama, dan ada kalanya juga dijadikan sebagai kegiatan tambahan yang memungkinkan untuk menambah penghasilan secara keseluruhan. Dalam kedua kasus tersebut, kegiatan penangkapan ikan dapat dilihat sebagai sumber penghasilan tambahan.

Manusia diperintahkan untuk mencari nafkah dalam apapun yang dilakukannya, yaitu melalui kerja kerasnya. Karena manusia wajib bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal, termasuk dalam ayat Al-Qur'an yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Qasas ayat 77, pekerjaan nelayan tidak

³Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditma 2005), 56-60

termasuk dalam kategori pekerjaan yang dilarang oleh Allah SWT. Secara khusus, ayat yang dimaksud menyatakan bahwa mereka yang wajib bekerja harus bekerja dengan baik :

وَأَبْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

”Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”⁴

Ayat ini, kita diperintahkan untuk menjalani kehidupan yang seimbang, artinya kita harus mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi kita, sekaligus menyambut kesenangan dunia ini dan hidup sesuai dengan ridho Allah sebagai bekal kita.akhirat. Mari manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya sambil tetap menyadari sepenuhnya bahwa tanpa memandang usia atau kehidupan kita, akan ada kehidupan setelah kematian. Dalam Islam sendiri diperintahkan untuk mencari kebutuhan hidup, segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, bekerja sebagai nelayan bukanlah pekerjaan yang diharamkan Allah karena merupakan usaha atau mencari penghasilan yang dapat menopang kesuksesan, kemakmuran,

⁴Departemen Agama RI *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung Cv-Penerbit J-ART, 2005), 555

dan kemajuan ekonomi atau pendapatan yang diterima masyarakat nelayan. Sebab, bekerja sebagai nelayan merupakan salah satu bentuk mencari penghasilan yang dapat menopang kesuksesan, kemakmuran, dan kemajuan ekonomi.

Masyarakat pesisir pada umumnya termasuk dalam kelompok masyarakat miskin yang dikategorikan lemah secara ekonomi. Mereka sering menjadi korban pertama yang paling menderita karena pendapatan yang mereka hasilkan tidak dapat diprediksi, dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa mereka termasuk dalam kelompok ini. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nelayan tidak hanya harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan yang mereka hasilkan setiap hari, tetapi juga harus berhadapan dengan pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil tangkapan mereka. Produk mereka. Selain itu, mereka seringkali harus berhadapan dengan berbagai persoalan dalam bentuk pemasaran, yang merupakan tantangan yang muncul bersamaan dengan tumbuhnya proses modernisasi di sektor pertanian.⁵

Pemberdayaan nelayan diperlukan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan untuk memberdayakan atau memperkuat perekonomian nelayan sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat yang dapat memperbaiki kondisi nelayan yang ada menjadi lebih baik di masa mendatang. Hal ini juga dapat memperbaiki kondisi nelayan masa depan menjadi lebih baik. Sangat penting untuk menciptakan kapasitas atau sumber daya manusia untuk

⁵Pius A Paranto, M Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), 136

memberdayakan nelayan, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan berbagai jenis bantuan dan arahan dalam upaya ini.

Mencermati potensi yang dimiliki kawasan pesisir, maka diperlukan peran Pemerintah dalam pengembangan perekonomian kawasan pesisir, khususnya di Kabupaten Wara Utara dan Kota Palopo. Hal ini dikarenakan adanya syarat minimal untuk dapat meyakinkan Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di wilayah pesisir tersebut, yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan mata pencaharian nelayan dan efisiensi perikanan secara keseluruhan. Beberapa inisiatif tersebut adalah pembangunan komunitas nelayan baru, renovasi yang sudah ada, relokasi atau desain ulang tempat pelelangan ikan (TPI), dan pendirian pasar ikan internasional. Nelayan dengan memanfaatkan secara optimal semua sumber daya yang tersedia di bawah kepemilikan dan pengelolaan yang benar untuk kebaikan bersama. Bumi dan air, serta kekayaan alam yang dikandungnya, harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam tanggung jawab.

Peran yang dilakukan Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo adalah Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Upaya tersebut antara lain pemberian bantuan alat tangkap, kemudahan akses permodalan, serta program pemberdayaan masyarakat

pesisir dan inisiatif sejenis lainnya. Padahal setiap program tersebut bekerja untuk tujuan bersama yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dan nelayan yang tinggal di wilayah pesisir.⁶ Adapun data Perikanan di Kota Palopo.

Tabel 1.1 Hasil Perikanan Tangkap Kota Palopo (ton)

Tahun	Hasil Kota Palopo	Hsil dari Luar Kota Palopo
2019	10.280.50	2.647.08
2020	10.276.30	5.814.70
2021	14.769.00	7.268.12
2022	14.861.60	10.174.95

Fenomena di wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo adalah masyarakat bekerja sebagai nelayan yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Hal tersebut dihadapkan pada kondisi masyarakat nelayan yang mayoritas adalah nelayan perahu kecil yang kurang diberdayakan, serta kurangnya peran Pemerintah daerah sebagai fasilitator dan mediator bagi masyarakat nelayan dalam mengembangkan potensi perikanan. Kuangnya pengetahuan masyarakat mengenai keselamatan dan perawatan mesin perahu membutuhkan peran Pemerintah dalam meliterasi msasyarakat pesisir untuk memaksimalkan pengetahuan masyarakat yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berdasarkan data dan fenomena diatas perlu adanya peran Pemerintah dalam meningkatkan dalam pemberdayaan nelayan sehingga peneliti tertarik

⁶Bambang Dan Masyur Effendi, 1998 Paradigma Strategi Dan Langkah Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan. Surabaya LKS

melakukan penelitian dengan judul “*Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo*”

B. Batasan Masalah

Tujuan dari pembatasan suatu isu adalah untuk mencegah kontak atau pembesaran suatu topik untuk membuat penyelidikan menjadi lebih rumit dan untuk memfasilitasi wacana untuk memastikan bahwa tujuan eksplorasi akan terpenuhi. Peneliti telah mengidentifikasi peran Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian nelayan di kawasan pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo sebagai salah satu batasan masalah. Dalam penelitian ini tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah dan kendala apa saja yang dialami pemerintah dalam upaya pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis upaya pemberdayaan nelayan yang dilakukan Pemerintah di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

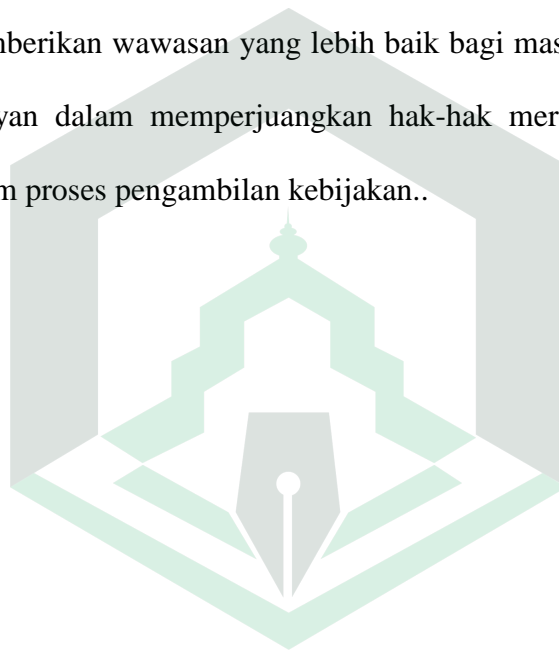
E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari riset ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Membantu memperkaya dan mengembangkan teori mengenai pemberdayaan nelayan oleh Pemerintah, terutama di wilayah pesisir yang memiliki kondisi dan tantangan khusus.
 - b. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait kebijakan Pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan.
 - c. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan di masa depan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah setempat untuk meningkatkan kinerja dalam memberdayakan nelayan, terutama di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
- b. Membantu pihak terkait dalam menentukan prioritas dan alokasi anggaran yang lebih efektif dan efisien dalam upaya pemberdayaan nelayan di wilayah tersebut.
- c. Memberikan wawasan yang lebih baik bagi masyarakat dan organisasi nelayan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan..



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penjelasan penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai acuan bagi peneliti dalam proses melakukan penelitian ini dan digunakan untuk menunjukkan keaslian peneliti terdahulu yang relevan. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan relevansi peneliti sebelumnya yang relevan. Untuk memberikan pemaparan yang ringkas tentang temuan dan penjelasan penelitian terdahulu yang penting yang digunakan sebagai referensi bagi peneliti, maka penelitian terdahulu harus terlebih dahulu memaparkan temuannya. Berikut ini adalah pilihan temuan yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya:

1. “Kajian Peran PemdadalamPemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Majene” oleh Marlina Rajab. Penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif dilakukan, dengan tujuan memberikan penjelasan tentang peran yang dilakukan Pemda , khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah Majene. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks inisiatif yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan status ekonomi dan politik masyarakat nelayan. Kajian ini mengacu pada Perda Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Menurut peraturan ini, upaya pemberdayaan nelayan dilakukan melalui tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan. Tugas dan fungsi

tersebut antara lain: pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi kelautan dan perikanan; pemanfaatan infrastruktur Kelautan dan Perikanan secara optimal; pembinaan dan pengembangan infrastruktur perikanan; penerapan teknik penangkapan ikan; dan perlindungan nelayan.⁷persamaan penelitian ini adalah sebanding dalam arti bahwa keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, dan penelitian tersebut dilakukan di dalam Dinas Perikanan. Perbedaanya terletak pada wilayah Pemerintahan yang berbeda dan pemberdayaan tiap daerah yang berbeda-beda dan skala penelitian sebelumnya adalah Kabupaten dan pada penelitian ini skala Desa atau kelurahan.

2. Kajian yang dilakukan oleh Noris Noviani Muslikh berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pertumbuhan Ekonomi Lokal Selama Wabah Covid-19”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami pemerintahan desa dan melakukan analisis terhadap unsur-unsur yang mendukung proses pertumbuhan ekonomi lokal serta hambatan yang ditimbulkan oleh Pemerintah Desa. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Kantor Pusat organisasi organisasi ini dapat ditemukan di Desa Ngenboh.⁸ Fakta bahwa keduanya melibatkan fungsi Pemerintah merupakan salah satu persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini. Namun, yang membedakan penelitian ini dari penelitian lain adalah fakta

⁷Marlina Rajab, “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Majene”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar (2021). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5810>

⁸Noris Noviani Mukhlis, “Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Saat Pandemi Covid-19” Jurnal Administrasi Publik FISIP, Universitas Surabaya Indonesia 2021. <http://repository.unteg-sby.ac.id/10775/9jurnal>

bahwa penelitian ini menyelidiki peran Pemerintah Desa dalam proses pembangunan ekonomi lokal. Pada masa Epidem Covid-19, penulis melakukan kajian terhadap pemerintah maupun nelayan di kawasan pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada waktu penelitian yang berbeda. Penelitian sebelumnya dilakukan saat pandemic covid-19 dan mengacu pada pertumbuhan ekonomi nelayan pada masa pandemic.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elvira Ramdayanti “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang” adapun hasil penelitiannya Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan berdasar kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam. Peran Pemerintah juga sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat nelayan diberikan pelatihan, pembinaan, sarana dan prasarana, dan juga asuransi bagi nelayan. Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang bisameningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya.⁹ Persamaan penelitian ini adalah sebanding dalam arti bahwa keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, dan penelitian tersebut dilakukan di dalam Dinas Perikanan. Perbedaannya terletak pada wilayah pemerintahan yang berbeda dan

⁹Elvira Ramdayanti “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Akreditasi Jurnal Nasional Sinta 5 ISSN 25280-1852, e-ISSN: 2721-0537 Vol VI, No.02, Desember 2021

pemberdayaan tiap daerah yang berbeda-beda. Di penelitian sebelumnya terdapat nelayan penambak garam sedangkan pada penelitian ini hanya nelayan pesisir seperti nelayan ikan dan rumput laut.

B. Deskripsi Teori

1. Peran Pemerintah

a. Peran Pemerintah

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang diposisikan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai "identitas yang dibangun secara sosial".¹⁰ Ketika seseorang bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang menyertai posisinya, mereka memainkan peran sebagai pekerja dan anggota masyarakat.

Teori peran menjelaskan bagaimana individu memahami dan memenuhi harapan-harapan yang diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya. Teori peran ini memfokuskan pada bagaimana individu memahami dan memenuhi harapan-harapan yang diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya terkait dengan peran yang dimainkan oleh individu tersebut.¹¹ Menurut teori peran, setiap individu memiliki beberapa peran yang harus dipenuhi, seperti peran sebagai anggota keluarga, peran sebagai pekerja, peran sebagai warga negara, dan lain-lain. Setiap peran memiliki harapan-harapan yang berbeda dan harus dipenuhi oleh individu yang memainkan peran tersebut.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 168

¹¹Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Edisi Kedua (Bandung: Mandar Maju 2013), 124

Harapan-harapan terkait dengan peran yang dimainkan oleh individu dapat berasal dari berbagai sumber, seperti norma-norma sosial, aturan-aturan sosial, nilai-nilai sosial, dan lain-lain. Individu yang memahami dan memenuhi harapan-harapan yang diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya akan memiliki peran yang konsisten dan efektif, sehingga dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya dengan baik

Kontribusi masyarakat nelayan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, teori peran dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana nelayan memahami dan memenuhi harapan-harapan yang diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya terkait dengan peran mereka dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Harapan-harapan terkait dengan peran Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dapat berasal dari norma-norma sosial, aturan-aturan sosial, nilai-nilai sosial, dan lain-lain.

Memahami dan memenuhi harapan-harapan terkait dengan peran nelayan dan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, nelayan akan memiliki peran yang konsisten dan efektif dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan keluarga secara efektif. Terkadang, nelayan mungkin tidak memahami atau tidak memenuhi harapan-harapan yang diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya terkait dengan peran mereka dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi gender, ketidakadilan gaji, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain.

Hal ini dapat memengaruhi kontribusi nelayan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, karena mereka mungkin tidak memiliki sumber daya dan akses yang cukup untuk memenuhi harapan-harapan yang diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh nelayan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Sehingga dapat disimpulkan dengan memahami teori peran, kontribusi nelayan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilihat sebagai suatu peran yang memiliki harapan-harapan dan tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh nelayan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memenuhi harapan-harapan terkait dengan peran nelayan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, agar mereka dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif.

Salah satu komponen negara yang memegang peranan penting dan bertanggung jawab dalam proses pengendalian roda Pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu Negara adalah Pemerintah itu sendiri. Karena nelayan secara tradisional telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan pedesaan hingga saat ini, tujuan pemerintah dalam skenario ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Partisipasi Pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan yang memberikan informasi, pengetahuan, dan pendidikan yang berkaitan dengan administrasi perusahaan perikanan menempatkan Pemerintah tersebut pada

posisi yang unik. Kelembagaan yang baru dikembangkan ini diharapkan dapat menumbuhkan modal sosial nelayan sehingga mereka dapat lebih menikmati kekuatan sosial dengan perekonomian yang mandiri. Untuk membina masyarakat nelayan yang lebih mandiri dan mandiri, Pemerintah harus berperan penting dalam memberikan pembinaan dan pelatihan.¹² Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik pasal 18 ayat 2 maupun pasal 18 ayat 5 menyatakan hal tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta memberikan perekonomian yang seluas-luasnya.¹³

Berdasarkan informasi di atas, Pemerintah Kota Palopo memiliki tanggung jawab dan peran dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya nelayan. Selain itu, pasal lain menyebutkan bahwa pemerintah wajib mendorong kegiatan usaha masyarakat dengan membangun kapasitas, menyediakan akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.¹⁴ Kewajiban ini dinyatakan dalam pasal tersebut.

b. Aspek-aspek Peran Pemerintah Daerah

1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Infrastruktur ini

¹²Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Prakasa 2013), 130

¹³Taliziduhu, Ndraha, *Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 157

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil

mencakup jalan, jembatan, transportasi, perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi.

- 2) Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian wilayahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan dan insentif kepada sektor-sektor yang memiliki potensi seperti industri, pariwisata, dan pertanian.
- 3) Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat.¹⁵ Pemerintah daerah harus menjamin bahwa fasilitas ini tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu.
- 4) Pemerintah daerah harus memastikan bahwa lingkungan hidup di wilayahnya terjaga dan tidak tercemar. Pemerintah daerah harus mengawasi dan mengontrol aktivitas yang dapat merusak lingkungan, seperti industri yang tidak ramah lingkungan atau pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
- 5) Pemerintah daerah juga harus menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan kesehatan.

2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

a. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Menurut Hikmat, pengembangan potensi ekonomi masyarakat hanyalah salah satu aspek dari arti pemberdayaan masyarakat. Menurut Hikmat,

¹⁵Syaukani, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2009), 167

pemberdayaan masyarakat juga harus mampu meningkatkan harkat, martabat, kepercayaan diri, dan harga diri masyarakat, serta menjaga tatanan nilai budaya masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan prinsip gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangua dengan “pemberdayaan” adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk memanfaatkan secara maksimal semua potensi gagasan dan kemauan suatu komunitas atau sekelompok orang untuk keluar dari kemiskinan yang melanda mereka.¹⁶ Pemberdayaan nelayan untuk memulai proses perbaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya tentunya diawali dengan inovasi kreatif yang diarahkan pada lingkungan.

Praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah pihak seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan atau pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, tindakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat hampir selalu dilakukan dalam bentuk kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan (income generate).¹⁷

Jika dilihat dari sudut pandang pluralis, pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang membantu individu kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan lain. Hal ini dilakukan dengan mengajari mereka dan membantu mereka dalam penerapan keterampilan di berbagai bidang seperti melobi, menggunakan

¹⁶Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2001), 16.

¹⁷Totok Mardikato, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Universitas Pers, 2010), 126.

media yang terkait dengan aksi politik, memahami cara kerja sistem (aturan main), dan topik terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penguatan kapasitas masyarakat untuk bersaing agar tidak ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses menginstruksikan orang, kelompok, atau keduanya bagaimana bersaing dalam batasan.¹⁸

Jika dilihat dari sudut pandang post-strukturalis, pemberdayaan merupakan proses menantang yang lebih menekankan pada aspek intelektual daripada kegiatan aksi atau pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, ini mengacu pada upaya untuk mengembangkan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan daripada bentuk pemberdayaan yang berorientasi pada tindakan.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya : “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.¹⁹

Ayat ini terdapat dalam Al-Qur'an, surat Al-Jum'ah (62), ayat 10. Dijelaskan tentang usaha yang dilakukan untuk mencari harta yang dianugerahkan Allah kepada umat manusia. Dilarang mengesampingkan urusan akhirat untuk mengejar aktivitas di dunia ini, dan kita wajib menggunakan harta yang kita miliki untuk mencari cara membahagiakan

¹⁸Totok Mardikanto, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Universitas Pers,2010), 135.

¹⁹Departemen agama RI, *Al- Jumanatul 'Ali Al- Qur'an dan terjemahannya* (Bandung :CV- Penerbit J-ART, 2005), 395

orang baik di dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, kita wajib bekerja untuk mencari rezeki halal yang telah Allah sediakan. Baik laki-laki maupun perempuan wajib mencari pekerjaan yang diridhoi Allah, baik di darat maupun di laut, karena ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Bekerja sebagai nelayan adalah pekerjaan yang sangat mulia karena memungkinkan seseorang untuk mengejar kebahagiaan serta ridha Allah SWT.

Pemberdayaan masyarakat dalam pasal 1 ayat 8 permendagri RI Nomor 7 tahun 2007 yaitu: menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemndirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.²⁰

Menurut Hermanto, nelayan yang pergi mencari ikan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1) Juragan Darat

Juragan darat adalah orang-orang yang memiliki perahu dan alat tangkap tetapi tidak berpartisipasi aktif dalam operasi penangkapan ikan di laut; namun, juragan darat juga memiliki tanggung jawab untuk menutupi semua pengeluaran yang terkait dengan kegiatan penangkapan ikan.²¹

²⁰Mahadin Shaleh, Muhammad Hafid Fadillah “Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dikecamatan Bara Kota Palopo “ Journal Of Institution And Shariah Finance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah, Vol 3, No. 1 (2020), 90. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia-finance/article/view/145/1082> di akses, selasa 03 Oktober 2023

²¹Hermanto, *Analisis Pendapatan Dan Pencurahan Tenaga Kerja Nelayan Di Desa Pantai Studi Kasus Di Muncara Bayuwangi* (Jakarta : Pusat Penelitian Agro Ekonomi Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, 1986), 156

2) Juragan Laut

Juragan laut adalah orang-orang yang di beri kepercayaan oleh juragan darat dalam operasi penangkapan ikan yang bukan milik juragan darat tetapi juga bertanggung jawab atas operasi penangkapan ikan. Dengan kata lain, juragan laut adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi penangkapan ikan.

3) Juragan Darat Laut

Mereka yang menerima keterlibatan pemilik unit penangkapan ikan dikenal sebagai juragan darat. Juragan darat adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam operasi penangkapan ikan di laut dan memiliki perahu, alat tangkap, dan barang-barang terkait penangkapan ikan lainnya.

Menurut M. Khalil Mansyur, memberdayakan masyarakat nelayan, atau dalam hal ini masyarakat yang mengatur kehidupannya dan mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya, merupakan cara terbaik untuk mencegah overfishing. Dalam skenario ini, individu yang bermukim di tepi pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan, nelayan rumput laut, atau sebagai nelayan yang membuat perahu nelayan dianggap sebagai bagian dari masyarakat nelayan.²²

b. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat nelayan

- 1) Pengorganisasian individu-individu ke dalam kelompok-kelompok kecil yang dapat dilakukan secara bebas dan berdasarkan kesamaan karakteristik

²²M. Khalil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 2002), 59.

seperti usia dan minat. Konsep pemberdayaan menekankan pada upaya kolaboratif yang memungkinkan tumbuhnya kelompok masyarakat.

- 2) Mendelegasikan tanggung jawab kepada masyarakat di bidang-bidang seperti perencanaan kegiatan, pengembangan program, bahkan evaluasi program yang telah dilaksanakan.
 - 3) Anggota komunitas melayani dalam peran kepemimpinan di dalam kelompok. Kelompok ini bertugas mengelola semua kegiatan, dan karena itu, setiap individu anggota masyarakat berbagi tanggung jawab untuk setiap kegiatan.
 - 4) Menurut M. Munandar Soeleman, hasil pemungutan suara atau musyawarah bersama harus dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk setiap kegiatan.²³Langkah-langkah pemberdayaan nelayan yang komperhensif
- c. Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan

Terkait topik ini, Sumadyo Samsu merancang empat inisiatif utama untuk setiap proyek pemberdayaan masyarakat²⁴, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat tidak lengkap tanpa memperhatikan pembangunan manusia sebagai komponen pekerjaan yang harus dilakukan.
- 2) Pengembangan usaha, yaitu setiap prakarsa dalam setiap pemberdayaan yang bertujuan memberikan manfaat bagi kemajuan kesejahteraan ekonomi.

²³M. Munandar Soeleman, Ilmu Sosial Dasar: Teori Dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 122.

- 3) Pengembangan masyarakat, yang mengacu pada semua tanggung jawab yang harus dipenuhi sehubungan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.
- 4) Terbentuknya kelembagaan, dalam arti suatu protokol baku yang diharapkan dapat diikuti oleh masyarakat asas-asas pemberdayaan masyarakat nelayan.²⁵

Berikut adalah daftar prinsip-prinsip panduan yang harus digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan pemberdayaan masyarakat nelayan:

- 1) Asas kemanusiaan yang memandang pemberdayaan sebagai alat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks proses memanusiakan manusia.
- 2) Asas keadilan sosial yang menempatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi yang merata, proporsional, dan adil sebagai tujuan pembangunan dan menjadi sarana mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir; prinsip ini juga dikenal sebagai "prinsip kesejahteraan sosial".²⁶
- 3) Gagasan demokrasi partisipatif, yang menyatakan bahwa kegiatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan merupakan proses panjang yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat.

²⁵Sumadyo Samsu, *Strategi dan Teknik Pembelajaran Membaca* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 129

²⁶Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2001), 34

3. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah wilayah yang berada di antara laut dan daratan. Wilayah ini terdiri dari daerah pantai dan laut yang mempunyai karakteristik dan dinamika yang berbeda dari wilayah daratan dan wilayah perairan dalam. Wilayah pesisir memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara geografis, wilayah pesisir membentang sepanjang garis pantai di seluruh dunia. Wilayah pesisir terdiri dari zona intertidal yang terletak di antara pasang surut air laut dan pantai, zona subtidal yang mencakup perairan dangkal hingga perairan dalam, dan zona daratan yang berbatasan langsung dengan pantai.

Wilayah pesisir memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti sumber daya perikanan, sumber daya mineral, dan sumber daya energi. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan pusat aktivitas ekonomi, seperti pariwisata, perdagangan, dan industri.²⁷

Namun, wilayah pesisir juga memiliki tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut dapat mengancam keberlangsungan wilayah pesisir. Selain itu, aktivitas manusia seperti pengembangan pariwisata dan industri, perikanan yang berlebihan, dan polusi juga dapat merusak lingkungan wilayah pesisir dan merugikan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

²⁷ Taufik, "Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 6, No. 1 : 61

Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir melibatkan berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjaga keberlangsungan wilayah pesisir dan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Wilayah pesisir sangat luas dan strategis, mencakup sekitar 81.000 km garis pantai. Wilayah pesisir Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian negara, khususnya dalam sektor perikanan dan pariwisata. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia.²⁸ Upaya pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan agar dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Pengelolaan wilayah pesisir, diperlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir di antaranya adalah:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Hal ini meliputi pengelolaan perikanan,

²⁸Wikipedia, "Pesisir" <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir>, (17 Januari 2020).

pengelolaan hutan bakau, dan pengelolaan sumber daya mineral. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan wilayah tersebut. Masyarakat harus diberdayakan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga lingkungan wilayah pesisir. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui program pelatihan, pemberian akses pada teknologi, dan pendampingan dalam pengembangan usaha.

c. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan lingkungan, serta mempertimbangkan potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial. Pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan keterpaduan antara infrastruktur daratan dan pesisir.

d. Pengendalian Pencemaran

Pencemaran di wilayah pesisir harus diendalikan agar lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak terganggu. Pencemaran bisa berasal dari kegiatan industri, limbah rumah tangga, dan limbah dari kapal. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan mengurangi pencemaran di wilayah pesisir.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan wilayah pesisir dan keberhasilan dari pengelolaan wilayah tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan program yang telah dijalankan berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Mengelola wilayah pesisir, peran Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan. Upaya pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta mempertimbangkan potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial. Dengan pengelolaan yang baik, wilayah pesisir dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

4. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merujuk pada sekelompok orang yang tinggal di daerah pesisir, yaitu wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Mereka hidup dari sumber daya alam yang tersedia di laut, seperti ikan, kerang, dan cumi-cumi. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh laut, sehingga mereka memiliki budaya dan tradisi yang unik. Masyarakat pesisir hidup dalam lingkungan yang sangat dinamis dan berubah-ubah. Laut yang menjadi sumber penghidupan mereka dapat berubah arusnya, pasang surutnya, dan kekayaan alam yang tersedia dapat berkurang atau bertambah. Oleh karena

itu, masyarakat pesisir perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras ini.

Masyarakat pesisir biasanya hidup dalam komunitas yang padat dan beragam, di mana mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai suku dan agama. Mereka juga memiliki budaya yang kaya, dengan tarian, musik, dan perayaan yang unik. Sebagian besar masyarakat pesisir juga sangat religius, dengan keyakinan dan praktik keagamaan yang sangat erat terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka.²⁹

Selain itu, masyarakat pesisir juga seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh akses ke fasilitas dan layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kesulitan geografis dalam mencapai wilayah pesisir, dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat pesisir juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Perubahan iklim telah menyebabkan naiknya permukaan laut dan badai yang lebih sering terjadi, sehingga mengancam tempat tinggal dan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir. Selain itu, degradasi lingkungan juga telah menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang dan hutan mangrove, yang menyediakan tempat bertelur bagi ikan dan tempat perlindungan bagi satwa liar, serta mengurangi daya serap gelombang yang dapat melindungi daerah pesisir dari abrasi.

²⁹Yunita, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 468.

Masyarakat pesisir juga telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan ini. Mereka telah mengembangkan teknik dan strategi yang unik dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga lingkungan mereka. Beberapa contoh dari strategi ini termasuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, pengelolaan hutan mangrove, dan upaya untuk meningkatkan keterampilan nelayan dalam mencari sumber daya alam.

Pemerintah dan organisasi non-Pemerintah juga telah berusaha untuk membantu masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan ini, dengan memberikan dukungan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai contoh, beberapa program pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir telah diluncurkan untuk membantu masyarakat pesisir meningkatkan kesejahteraan mereka. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke sumber daya keuangan untuk membantu masyarakat pesisir dalam mengembangkan usaha kecil dan menambah pendapatan mereka.

Masyarakat pesisir juga semakin disadari pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan pesisir. Mereka seringkali terlibat dalam kegiatan konservasi dan upaya pengelolaan lingkungan seperti menanam kembali terumbu karang, rehabilitasi hutan mangrove, dan pengelolaan sampah.

Banyak tantangan dan masalah masih dihadapi oleh masyarakat pesisir. Salah satu masalah utama adalah pengambilan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan penurunan

populasi ikan dan kerang serta kerusakan lingkungan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan industri di daerah pesisir seringkali berdampak buruk pada lingkungan, seperti pencemaran air dan udara.

Mengatasi masalah ini, Pemerintah dan organisasi non-Pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat pesisir untuk mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif kegiatan industri dan pembangunan. Pendidikan dan pelatihan juga sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga lingkungan.

Secara keseluruhan, masyarakat pesisir adalah kelompok yang unik dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang sangat berharga. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dan masalah yang kompleks, dan perlu dukungan dari Pemerintah dan organisasi non-Pemerintah untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta menjaga lingkungan pesisir yang berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk memperhatikan hak asasi manusia dan perlindungan sosial dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai contoh, pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi di daerah pesisir tidak merugikan hak-hak masyarakat pesisir, seperti hak atas tanah adat, hak akses ke sumber daya alam, dan hak-hak lainnya.

Perlindungan sosial juga sangat penting, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat miskin. Program-program seperti bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, masyarakat pesisir juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem pesisir. Mereka dapat menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjaga lingkungan, karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan.

Konteks global, masyarakat pesisir juga penting dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Pesisir dan laut merupakan salah satu daerah yang paling terdampak oleh perubahan iklim, dan masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Kesimpulannya, masyarakat pesisir adalah kelompok yang unik dengan budaya dan tradisi yang kaya serta menghadapi tantangan dan masalah yang kompleks. Dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, penting untuk memperhatikan hak asasi manusia dan perlindungan sosial, menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem pesisir, serta meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat pesisir dalam

pengelolaan sumber daya alam dan menjaga lingkungan pesisir yang berkelanjutan.

C. Kerangka Pikir

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, terutama masyarakat nelayan, melalui kebijakan atau program yang mencakup aspek sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan kondisi kelembagaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Perda Kota Palopo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan yang memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi nelayan melalui fasilitas dan kemudahan, seperti sarana/kapal apung, alat dan perlengkapan penangkapan ikan, serta sarana produksi perikanan.

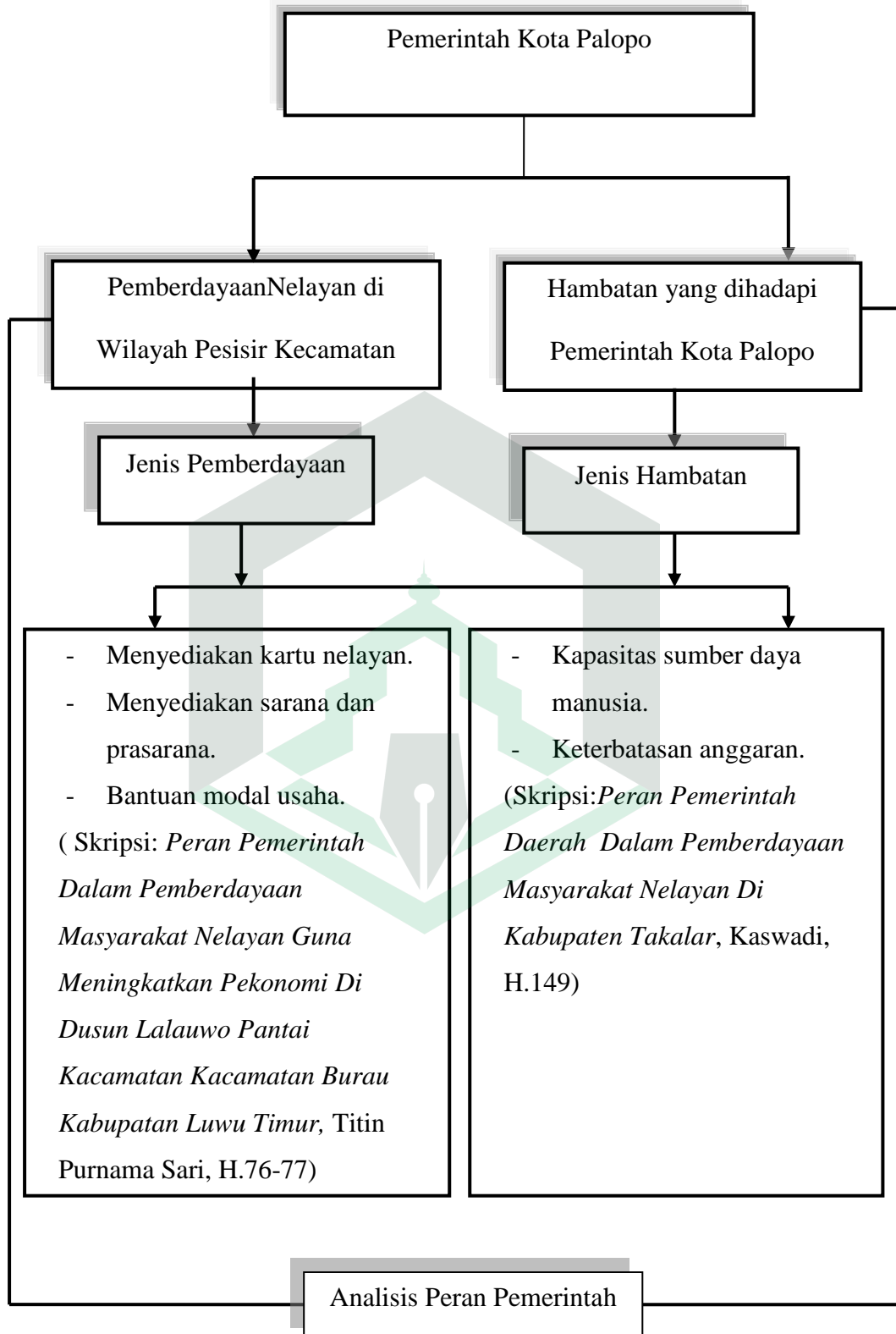
Namun, dalam mewujudkan misi pemberdayaan masyarakat nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, arah kebijakan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah daerah harus mampu mensejahterakan masyarakat nelayan dengan melihat indikator keberhasilan program pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh Edi Suharto. Indikator keberhasilan tersebut meliputi kebebasan bergerak, kemampuan membeli komoditas kecil dan besar, partisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, kebebasan relatif

dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, serta kemampuan membeli komoditas besar.³⁰



³⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditma, 2005), 63

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu metode penelitian yang secara langsung relevan dengan topik penelitian dan merupakan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif diambil sebagai metode inkuiri. Temuan penelitian kualitatif tidak dihasilkan dengan menggunakan proses statistik atau bentuk perhitungan lain, seperti halnya penelitian kuantitatif.

Ada bentuk tujuan studi yang dikenal sebagai ini, dan temuannya tidak mengizinkan penggunaan metode matematika atau jenis matematika lainnya.³¹Peneliti memberi judul penelitiannya “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Kawasan Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo” (Peran Pemerintah Dalam Memberi Kewenangan Lebih Kepada Nelayan). Selain itu, membaca buku tidak dapat dipisahkan dari studi literatur, serta produksi jurnal, tesis, dan sebagainya.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu

Peneliti mengacu pada lokasi penelitian dan melakukan penelitian pada lokasi tertentu yang ada di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo pada peran Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan. Pemilihan lokasi ini karena daerah di Kecamatan Wara adalah salah satu daerah pesisir yang terdapat di Kota Palopo. Adapun jangka waktu yang digunakan kurang lebih 2 bulan.

³¹Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

C. Definisi Istilah

1. Peran Pemerintah

Dalam sektor pertanian dan kelautan, peran Pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya petani dan nelayan. Pemerintah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh petani dan nelayan, seperti modal, alat dan mesin pertanian, serta bantuan sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

2. Pemberdayaan Nelayan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat nelayan. Upaya pemberdayaan nelayan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam mengakses sumber daya dan pasar, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tangkapan ikan. Dalam hal ini, Pemerintah dan berbagai pihak terkait berupaya memberikan bantuan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh nelayan, seperti sarana produksi perikanan, pelatihan, akses permodalan, pengembangan teknologi, dan penguatan kelembagaan nelayan.

3. Wilayah Pesisir

Wilayah yang berada di sekitar garis pantai, yang mencakup daerah laut dangkal, pantai, dan pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir seringkali memiliki potensi alam yang kaya, seperti sumber daya perikanan, terumbu karang, hutan bakau, dan pariwisata. Oleh karena itu, wilayah pesisir menjadi daerah

yang strategis dan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan pedoman, prosedur, atau cara perencanaan penelitian yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti untuk mengembangkan model penelitian strategis. Desain studi seperti panduan bagi peneliti dalam mengidentifikasi peralatan akuisisi data, mengumpulkan data, dan menganalisisnya.³²

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui penelitian atau pengumpulan data sendiri. Data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi langsung, pengukuran langsung, dan metode penelitian lainnya. Data primer memiliki keunggulan dalam keakuratan dan relevansi karena diperoleh langsung dari sumbernya, namun kelemahan dari pengumpulan data primer adalah biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengumpulan dan analisis data. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Muh. Asri Yusuf, S.Sos selaku kepala kelurahan penggoli, selaku kepala Dinas Perikanan Ibu Hj. Nurlaeli, S.Pt.,MP, H. Maharding selaku ketua kelompok nelayan

³²Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 28.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah diterbitkan atau tersedia untuk umum, seperti buku, jurnal, laporan, dan basis data publik. Data sekunder ini sering digunakan dalam penelitian dan analisis karena tersedia dengan mudah dan relatif murah, namun kelemahannya adalah kemungkinan kekurangan informasi, tidak aktual, atau tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian yang spesifik.

F. Instrumen Penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan, metode yang secara intrinsik terkait dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Ketika peneliti tidak menggunakan angka dan rumus untuk sampai pada kesimpulan mereka, mereka sedang melakukan penelitian kualitatif. Temuan ini mengesampingkan penggunaan matematika atau pendekatan kuantitatif lainnya untuk pertanyaan penelitian.³³ Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Kawasan Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo mencermati pertanyaan tersebut. Selain itu, kajian buku tidak dapat dipisahkan dari kajian literatur, jurnal, tesis, dan karya akademik lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah teknik yang sering digunakan dalam berbagai jenis penelitian dan

³³ S. Nasution, *Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 56.

analisis.³⁴ Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing teknik pengumpulan data tersebut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan mengamati dan merekam apa yang terjadi di lingkungan yang diamati. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tergantung pada tujuan penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam bentuk pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat melibatkan pengamatan partisipan atau non-partisipan.³⁵

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden atau sumber informasi yang relevan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, dan dapat melibatkan pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara dapat dilakukan dengan satu atau beberapa responden, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan.³⁶ Adapun responden dalam penelitian ini adalah Muh. Asri Yusuf, S.Sos selaku kepala kelurahan penggoli, selaku kepala Dinas Perikanan Ibu Hj. Nurlaeli, S.Pt.,MP, H. Maharding selaku ketua kelompok nelayan.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 104.

³⁵P. Joko Subagyo, S.H, “*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), H 63.

³⁶P. Joko Subagyo, S.H, “*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), H 39.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen, catatan, laporan, dan sumber informasi lain yang relevan. Dokumentasi dapat meliputi sumber informasi tertulis, audio, atau visual. Dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data primer atau sekunder, tergantung pada jenis dokumen yang digunakan.³⁷

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Lexi J. Meleong, ada beberapa cara untuk menguji keabsahan data, salah satunya adalah dengan menggunakan metode Triangulasi.³⁸ Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sumber data yang sudah ada. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, dilakukan pengujian keabsahan data dengan tiga bagian, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yang menggali kebenaran atau kredibilitas suatu data dengan memeriksa data dari beberapa sumber yang berbeda, seperti hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan Pemerintah Kota Palopo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo serta masyarakat nelayan.
2. Triangulasi teknik, yang dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang serupa tetapi menggunakan teknik yang berbeda, seperti memeriksa hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 124.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdaKarya, 2018), 330.

3. Triangulasi waktu, yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu dan situasi yang berbeda untuk memastikan keabsahan data.³⁹ Contohnya, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, akan lebih valid dan kredibel. Selanjutnya, data tersebut dapat dicocokkan dengan hasil wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama dari teknik analisis data adalah untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data dan membuat kesimpulan atau rekomendasi berdasarkan hasil analisis.⁴⁰

1. Reduksi Data

Tahap ini melibatkan penyederhanaan data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Reduksi data dapat dilakukan melalui teknik-teknik seperti pemilihan, abstraksi, kategorisasi, sintesis, dan transformasi data kualitatif. Teknik pemilihan digunakan untuk memilih data yang relevan dan penting, sementara teknik abstraksi digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan tema-tema yang muncul dari data. Teknik kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang lebih terorganisir, sedangkan teknik sintesis digunakan untuk menggabungkan kategori-kategori tersebut ke dalam suatu model atau

³⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdaKarya, 2018), 330.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 402

kerangka konseptual. Terakhir, teknik transformasi digunakan untuk mentransformasikan data kualitatif ke dalam bentuk yang lebih sistematis atau terstruktur.⁴¹

Dalam proses mereduksi data peneliti memilah dan menyederhanakan hasil wawancara dari beberapa responden sehingga hasil penelitian dapat menjurus pada tujuan penelitian. Pada saat penelitian, peneliti melakukan wawancara dan hasil dari wawancara di olah lebih sepsifik lagi kemudian kesimpulan finalnya bisa didapatkan.

2. Penyajian Data

Tahap ini melibatkan penyajian data yang telah direduksi oleh peneliti. Penyajian data dapat dilakukan melalui teknik-teknik seperti tabel, diagram, grafik, dan model visual lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempermudah pemahaman tentang konsep-konsep atau tema-tema yang muncul dari data kualitatif.⁴² Pada penyajian data peneliti menyajikan data berupa uraian singkat, penyajian data pelatihan atau pemberdayaan masyarakat nelayan dalam bentuk tabel serta dalam bentuk wawancara yang telah di jawab oleh pihak responden.

3. Verifikasi Data

Tahap ini melibatkan verifikasi atau konfirmasi data yang telah direduksi dan disajikan oleh peneliti. Verifikasi dapat dilakukan melalui teknik-teknik seperti triangulasi data, member checking, dan peer debriefing. Teknik triangulasi data digunakan untuk membandingkan data dari sumber

⁴¹Sugiyono, *Metode Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247

⁴²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 95

yang berbeda untuk memastikan keakuratan data, sedangkan teknik *member checking* digunakan untuk meminta subjek atau partisipan penelitian untuk memeriksa keakuratan interpretasi. Terakhir, teknik *peer debriefing* melibatkan diskusi dengan rekan peneliti atau ahli untuk memastikan keabsahan dan keakuratan interpretasi data.⁴³

Pada tahap verifikasi data peneliti membandingkan hasil wawancara dari responden dengan beberapa data yang telah di dapatkan berupa data pelatihan atau pemberdayaan yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dan masyarakat nelayan setempat.



⁴³Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dan Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 139

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Lokasi

Di antara empat daerah merdeka yang membentuk Tanah Luwu, Kota Palopo menempati urutan keempat hingga terakhir. Terletak antara $120^{\circ}03$ dan $120^{\circ}17.3$ BT dan $2^{\circ}53.13$ dan $3^{\circ}4$ LS, pada ketinggian 0–300 meter di atas permukaan laut, Kota Palopo berjarak sekitar 375 kilometer di utara Kota Makassar. Lebih dari 30% daratan terletak di dataran rendah atau sepanjang pantai, dengan kota Palopo menempati daerah ini di sebelah timur; 70% sisanya terdiri dari pegunungan dan perbukitan yang membentang dari utara ke selatan dan mencapai ketinggian hingga 1000 meter. Sekitar 247,52 kilometer persegi (0,39 persen luas Provinsi Sulawesi Selatan) dikhususkan untuk kebutuhan administrasi Kota Palopo. Kota Palopo memiliki 9 kecamatan administratif dan 48 kecamatan yang lebih kecil. Mayoritas Kota Palopo terletak di dataran rendah karena letaknya yang dekat dengan pantai.⁴⁴Kota Palopo yang terletak di tepi Teluk Bone memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian lokal melalui kedekatannya dengan industri perikanan.

b. Sejarah Kelurahan Penggoli

Wara Utara Kota Palopo meliputi kecamatan Penggoli serta beberapa kecamatan lain yang lebih kecil. Banyak orang tinggal di perumahan yang

⁴⁴Portal Resmi Pemerintah Kota Palopo, “Profil, Geografis” <https://palopkota.go.id/page/geografis> (17 September 2022)

tidak rata di Kecamatan Pengoli, yang berkontribusi pada tingginya kepadatan penduduk di lingkungan tersebut. Panas dan lembab karena area tersebut telah sepenuhnya dikembangkan; tidak ada tempat tersisa untuk menanam pohon sebagai penyejuk udara alami di sepanjang jalan dan di pekarangan orang. itu. Ini karena banyak orang yang tinggal di daerah yang relatif kecil; meskipun banyak rumah di sini yang hanya berukuran sedang sempit dan berteras-teras, namun luas tanahnya masih cukup kecil, dan jarak antar rumah masing-masing cukup dekat, atau bahkan bisa dikatakan hanya ada satu dinding yang memisahkan sekelompok rumah. Kecamatan Batu Pasik yang sudah ada sejak tahun 2006 dipecah menjadi dua untuk membentuk kecamatan baru.

1) Luas wilayah

Letak kelurahan ini adalah dekat dengan Kota Palopo dengan jarak 15 km atau dalam tempuh 30 menit, dengan luas area 1,82 km.

2) Jumlah penduduk

Penduduk Kelurahan Penggoli laki-laki berjumlah 1.380 orang dan perempuan berjumlah 1.389 orang dan persentase perkembangan laki-laki 5,02% sedangkan persentase perempuan 5,15%.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk pada tahun 2022

No.	Penduduk	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1.380	5,02%
2.	Perempuan	1.389	5,15%

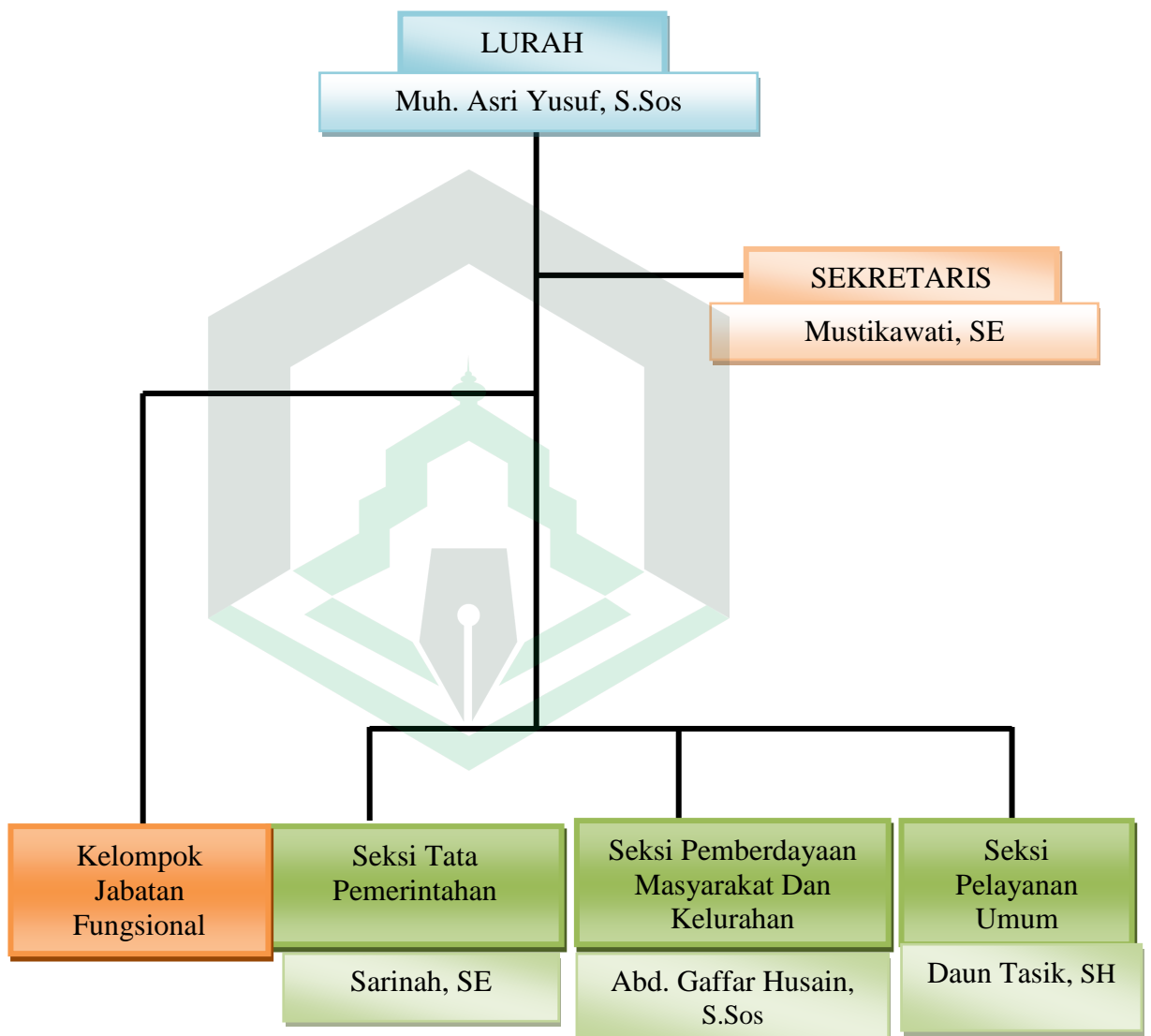
Sumber Buku: Buku Profil Desa dan Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara Kota Palopo tahun 2022

c. Struktur Organisasi Kelurahan Penggoli

Setiap Desa atau kelurahan tidak lepas adanya struktur organisasi di mana orang-orang yang memainkan peran, dari manajemen hingga karyawan, terstruktur dengan caraini.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI**KELURAHAN PENGGOLI****KECAMATAN WARU UTARA KOTA PALOPO**

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Pemberdayaan Nelayan yang Dilakukan Oleh Pemerintah di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

Pemerintah melakukan upaya pemberdayaan nelayan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu program yang diberikan kepada masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo adalah untuk meningkatkan prospek ekonomi dengan meningkatkan kreativitas orang miskin:

a. Menyediakan kartu nelayan

Kartu Nelayan adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada nelayan yang telah terdaftar dan memiliki hak untuk memperoleh manfaat dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan nelayan. Kartu ini berisi informasi tentang identitas nelayan, jenis kapal, alat tangkap, daerah penangkapan, dan informasi lain yang berkaitan dengan aktivitas perikanan.

Kartu Nelayan diberikan kepada nelayan yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki kapal dan alat tangkap yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, serta telah memiliki izin penangkapan ikan yang sah. Dalam beberapa program, kartu ini juga digunakan untuk menentukan kriteria penerima manfaat, seperti dalam program bantuan perikanan dan program bantuan langsung tunai.

Program bantuan perikanan, Kartu Nelayan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan, seperti peralatan dan bahan bakar untuk melaut. Sementara dalam program bantuan langsung tunai, Kartu Nelayan digunakan sebagai identitas untuk menentukan penerima manfaat yang berhak mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai.

Kartu Nelayan diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam memantau aktivitas perikanan dan memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan sektor perikanan. Selain itu, Kartu Nelayan juga dapat membantu nelayan dalam memperoleh akses ke manfaat dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, serta menjaga keamanan dan keselamatan mereka dalam melakukan aktivitas perikanan.

Seperti yang dikemukakan oleh kepala kelurahan bahwa:

“Dengan adanya bantuan pemerintah yang menerbitkan kartu nelayan, masyarakat mampu mendapatkan program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi salah satu acuan untuk nelayan agar mendapatkan bantuan dari pemerintah.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kelurahan mengatakan bahwa dengan adanya kartu nelayan masyarakat dengan mudah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

b. Menyediakan sarana dan prasarana

Pemberian bantuan langsung seperti sarana penangkapan ikan dan sarana pendukung lainnya dapat meningkatkan pendapatan nelayan, karena sumber daya laut merupakan sumber daya bersama yang dapat dimanfaatkan secara

⁴⁵Wawancara Dengan Kepala Kelurahan, *Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Pada Tanggal 30 Juni 2022

maksimal dengan kemampuan nelayan dan peralatan yang dimiliki. Dengan adanya sarana dan prasarana untuk melaut, kemampuan nelayan dalam menghasilkan tangkapan akan meningkat sehingga pendapatan mereka pun ikut meningkat. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Kelurahan Penggoli Kota Palopo bahwa:

”Pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat nelayan berupa alat yang mereka butuhkan seperti puka, jaring, katrol, perahu, mesin, timba dan lain sebagainya. Menangkap ikan bukan hanya membantu mereka pada saat sementara saja tetapi kedepannya akan mengupgrade kemampuan mereka dalam menangkap ikan yang hasilnya akan meningkatkan pendapatan sehari-hari mereka.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Muh. Asri Yusuf, S.Sos selaku kepala Kelurahan Penggoli mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan maka pendapatan nelayan di wilayah pesisir dapat meningkat juga dengan adanya bantuan yang diberikan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh selaku kepala Dinas Perikanan Ibu Hj. Nurlaeli, S.Pt.,MP Kota Palopo yaitu bahwa :

“Ya itu selain memberikan bantuan secara administrasi, memberikan pembinaan, melakukan penyuluhan sosialisasi juga memberikan bantuan sarana dan prasarana dan ada beberapa program itu seperti sertifikat nelayan asuransi nelayan itu juga merupakan program pemberdayaan untuk masyarakat nelayan di wilayah pesisir.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu H.j Nurlaeli menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendukung sepenuhnya pemberdayaan masyarakat di pesisir khususnya untuk nelayan itu terlihat dari adanya bantuan dari

⁴⁶Wawancara Dengan Kepala Kelurahan Penggoli, *Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Pada Tanggal 30 Juni 2022

⁴⁷Wawancara Dengan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan, *Mengenai Pemberdayaan Masyarakat nelayan*, Pada Tanggal 25 Juli 2022

Pemerintah untuk para nelayan. Dan juga seperti yang telah di sampaikan oleh salah satu masyarakat nelayan yaitu.

Seperti yang dikemukakan oleh H. Maharding selaku ketua kelompok nelayan bukkang suji bahwa:

“Kami senangkarena pemerintah bagus caranya nakasikan ki bantuan yang kami butuhkan itu, Pemerintah ya sangat membantu masyarakat apalagi kami para nelayan yang memang membutuhkan bantuan untuk alat-alat yang kami butuhkan, seperti: tima, katrol, puka, mesin, tali dan masih banyak lagi jadi itu kalo ada nakasikan ki bantuan na tidak cukup untuk dibagi, kami lagi yang bagi berapapun itu.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Maharding salah seorang nelayan, sudah jelas bahwa Pemerintah sangat membantu masyarakat nelayan untuk meningkatkan hasil pendapatan sehari-harinya dalam hal ini Pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat nelayan yang ada di pesisir.

c. Bantuan modal usaha

Bantuan modal usaha adalah program yang diberikan oleh Pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk membantu mereka memulai, mengembangkan, atau memperluas usaha mereka. Program bantuan modal usaha bertujuan untuk membantu UKM agar bisa memiliki akses ke modal yang dibutuhkan untuk memperluas usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja.

Program bantuan modal usaha dapat berupa dana tunai atau bantuan non-tunai seperti pelatihan, konseling, dan pengembangan usaha. Bantuan

⁴⁸Wawancara Dengan H. Maharding Selaku Kelompok Nelayan, *Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Pada Tanggal 27 Juli 2022

modal usaha dapat diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman dengan bunga rendah atau tanpa bunga.

Bantuan modal usaha sangat penting bagi UKM karena sebagian besar UKM tidak memiliki akses ke modal yang cukup untuk memperluas usaha mereka. Dengan bantuan modal usaha, UKM dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, sehingga meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar global. Selain itu, program bantuan modal usaha juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Ibu Hj. Nurlaeli, S.Pt.,MP Mengatakan bahwa :

“Bantuan atau prosedurnya itu masyarakat membuat proposal yang difasilitasi oleh penyuluh itu kemudian di sampaikan kepada bapak Walikota setelah ada penyampain atau petunjuk dari bapak Walikota baru mereka diproses lah ya kemudian diusulkan ke anggaran untuk di realisasikan ke tahun depannya.”⁴⁹

Dari wawancara yang telah dilakukan, terungkap bahwa Pemerintah telah memberikan dukungan dalam pemberdayaan nelayan melalui penyediaan modal usaha dan alat tangkap. Untuk memastikan efektivitas bantuan tersebut, Pemerintah Daerah tidak lagi memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk uang tunai, namun langsung dalam bentuk barang seperti jaring, perahu, katrol, tima dan lain sebagainya, yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.

⁴⁹Wawancara Dengan Kepala Dinas Perikanan, *Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Pada Tanggal 25 Juli 2022

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Perikanan Ibu H.j Nurlaeli mengatakan bahwa :

“Dalam penyaluran bantuan untuk kelompok nelayan kami memberikan amanah kepada pendamping penyuluh lapangan untuk membagikan alat yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk nelayan tersebut.⁵⁰

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa para nelayan yang diberikan bantuan telah diserahkan kepada pendamping penyuluh untuk dibagikan para kelompok nelayan tersebut. Seperti yang dikemukakan salah seorang kelompok nelayan bapak Hamid mengatakan bahwa:

”Kelompok kami berdiri sejak tahun 2000 dan kami ada 10 orang dan mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui dinas perikanan lalu pendamping penyuluh yang memberikannya kepada kami para nelayan, berupa peralatan yakni puka, katrol dan timpa yang jumlah ada 10 jadi kami bagi itu semua ke dalam anggota kelompok. Kalopun tidak cukup 10 kami saling membagi lagi dan bekerja sama istilahnya bergantianlah pakai itu alatnya.”⁵¹

d. Pelatihan dan Penyuluhan

Adapun beberapa pelatihan dan penyuluhan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat wilayah pesisir Kota Palopo

Tabel 4.2 Pelatihan Masyarakat Wilayah Pesisir.

No	Jenis Pelatihan	Tahun
1	Pelatihan penangkapan Ikan ramah lingkungan	2020
2	Pelatihan manajemen keuangan bagi nelayan	2020
3	Pelatihan perawatan alat tangkap dan perawatan mesin	2021
4	Pelatihan keselamatan di laut	2019

⁵⁰Wawancara Dengan Kepala Dinas Perikanan, *Mengenai Pemberdayaan masyarakat Nelayan*, Pada Tanggal 25 Juli 2022

⁵¹Wawancara Dengan Salah Satu Kelompok Nelayan, *Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Pada Tanggal 27 Juli 2022

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo

2. Hambatan yang di Hadapi Pemerintah dalam Melakukan Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

Hambatan yang dihadapi Pemerintah yaitu masyarakat kadang kurang memperhatikan program-program atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah karena sebagian dari mereka ada yang tidak memahami dari apa yang telah disampaikan.

a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo sangat rendah karena mayoritas nelayan hanya memiliki pendidikan SD atau SMP bahkan ada yang tidak tamat sekolah. Mereka hanya mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan lanjutan. Selain itu, pola kehidupan yang kurang produktif juga berkontribusi pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan. Meskipun nelayan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, keadaan ini tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Adapun hambatannya yaitu gaya hidup konsumtif dimana ketika ada banyak pendapatan mereka tidak menyimpannya untuk di masa panceklik yang akan tiba mereka tidak memikirkan untuk kedepannya, tidak menabung sebagian dari pendapatan yang diterimanya.

Seperti yang dikemukakan oleh kepala kelurahan penggoli bahwa :

“Nelayan kita didaerah pesisir rata-rata ada yang tidak sekolah ada hanya tamatan SD jadi kemampuannya sangat terbatas, khususnya dalam pengelolaan keuangan, mereka tidak memiliki keahlian untuk mengelolah keuangannya dikemudian hari. Inilah salah satu yang menghambat kami dalam memberdayakan nelayan karena upaya yang kami lakukan tidak serta merta dapat langsung diserap dan diterima untuk masyarakat nelayan karena hambatannya di SDM nelayan itu sendiri.”⁵²

b. Keterbatasan anggaran

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan, anggaran memegang peranan penting sebagai faktor penggerak kelancaran seluruh kegiatan yang dilakukan oleh elemen lembaga Pemerintahan. Kendati demikian, keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala yang dapat menghambat program pemberdayaan nelayan dan belum memenuhi sepenuhnya kebutuhan nelayan. Seperti yang dikemukakan oleh kepala dinas perikanan bahwa :

“ kami sudah semaksimal mungkin melakukan pemberdayaan nelayan untuk memberikan bantuan peralatan untuk digunakan sebagaimana mestinya, tetapi anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi semua nelayan diwilayah pesisir. Sehingga banyak diantara nelayan yang merasa tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah.”⁵³

Salah satu dari kelompok nelayan sipatuo mengatan bahwa:

“Selama ka melaut baru satu kali ka dapat bantuan kelompok itupun katrol sama puka na sudah lama mi lagi ini tidak ada bantuannya keluar tapi waktu pandemi banyak batuan keluar itumi di pakai sebagian beli perlengkapan untuk melaut.”

⁵²Wawancara Dengan Kepala Kelurahan Penggoli, *Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Pada Tanggal 30 Juni 2022

⁵³Wawancara Dengan Kepala Dinas Perikanan, *Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Peningkatan Pendapatan*, Pada Tanggal 25 Juli 2022

Hal senada diutarakan oleh ketua kelompok nelayan padaidi mengatakan bahwa:

“Saya dapatka bantuan dua kali dari berdirinya kelompok kami pada tahun 2002 hanya katrol itupun 3 bulan ji berjalan na rusak jadi kami sendiri yang mencari modal untuk beli peralatan yang kami dibutuhkan lagi.”⁵⁴

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mirsan dan Bapak Hamka, diketahui bahwa dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat nelayan belum mampu menangani masalah kemiskinan di kalangan nelayan. Hal ini terjadi karena bantuan yang diberikan hanya diperuntukkan bagi sebagian kecil nelayan. Padahal, anggaran yang mencukupi sangat penting dalam memastikan pemberdayaan nelayan dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya anggaran akan menjadi hambatan dalam pemberdayaan, karena bantuan yang diberikan tidak bisa menjangkau semua nelayan. Oleh karena itu, seharusnya dana yang dialokasikan dapat dinikmati oleh seluruh nelayan.

C. Pembahasan

1. Upaya Pemberdayaan Nelayan yang Dilakukan Oleh Pemerintah di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

Pemerintah memainkan peran penting sebagai salah satu unsur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan mencapai tujuan negara Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tanggung jawab pemerintah mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia dan kekayaan alamnya, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan

⁵⁴Wawancara Dengan Bapak Hamka, Seorang Nelayan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pada Tanggal 27 Juli 2022

pendidikan dan kecerdasan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kemakmuran, namun tidak seharusnya membebani masyarakat. Sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, pemerintah bertugas untuk menetapkan arah dan menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan pemberdayaan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir memperlihatkan peran Pemerintah sebagai regulator dalam mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya. Selain itu, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memantau kualitas lingkungan pesisir secara berkala untuk mengetahui arah pola pengembangannya.

Meski demikian, proses pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo belum berjalan dengan baik karena kurangnya perhatian Pemerintah terhadap masyarakat nelayan. Sebagai regulator, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang dibuat dapat menguntungkan masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai dinamisator, Pemerintah harus memotivasi dan membimbing masyarakat dalam membangun kemandirian dan mengembangkan potensi mereka agar dapat mencapai kemakmuran. Sebagai

fasilitator, Pemerintah harus memberikan akses dan dukungan yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu lebih memperhatikan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat nelayan, terutama di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan, pelatihan dan pendidikan, serta dukungan modal dan akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang dibuat dapat mendukung dan memperkuat kegiatan usaha masyarakat nelayan tanpa merugikan lingkungan dan sumber daya alam yang ada.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk memberikan kemampuan, sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk dapat mengambil kontrol atas hidup dan masa depan mereka. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan akses ke pendidikan dan pelatihan, memberikan dukungan modal dan teknologi, serta membangun jaringan sosial yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah, LSM, dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, pemberdayaan masyarakat

sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan dan kurang berkembang. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan teknologi, serta memberikan dukungan modal dan akses ke pasar.

Adapun data-data pemberdayaan yang telah dilakukan di Kecamatan Wara Kota Palopo yaitu :

Tabel 4.3 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kota Palopo

No	Jenis Pemberdayaan	Tahun
1.	Kartu Nelayan	2018
2.	Pemberian Bantuan Modal	2018
3	Menyediakan sarana dan prasarana	2019
4	Mengadakan Pelatihan	2019

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan membangun kelembagaan dan jaringan sosial yang kuat dan berkelanjutan, seperti koperasi, kelompok tani, dan organisasi masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk memperkuat ekonomi lokal dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dibuat sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.⁵⁵

Pemberdayaan nelayan juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di sektor perikanan. Pemberdayaan nelayan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan nelayan, serta meningkatkan produktivitas sektor perikanan secara keseluruhan. Pemberdayaan nelayan meliputi berbagai upaya, seperti peningkatan akses terhadap teknologi, pelatihan, modal, dan pasar.

Beberapa program pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain Program Bantuan Stimulan Perikanan (BSP) dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk nelayan kecil dan miskin. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan memperbaiki kesejahteraan mereka.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan dalam penyediaan peralatan dan infrastruktur yang diperlukan oleh nelayan, seperti kapal, jaring, mesin, dan pelabuhan. Pemerintah juga membantu membangun kelembagaan dan jaringan sosial yang kuat dan berkelanjutan di antara nelayan, seperti koperasi dan kelompok nelayan.

Pemberdayaan nelayan juga harus dilakukan secara berkelanjutan dan partisipatif, dengan melibatkan nelayan dalam setiap tahapan proses pembangunan. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan dan program pemberdayaan nelayan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

⁵⁵Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), H. 86

nelayan, serta dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan sektor perikanan secara keseluruhan.

Teori peran Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan didasarkan pada pandangan bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Teori ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan.⁵⁶

Sebagai regulator, Pemerintah memiliki peran untuk menetapkan regulasi dan kebijakan yang dapat mendukung kegiatan usaha nelayan tanpa merugikan lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Sebagai dinamisator, Pemerintah harus memotivasi dan membimbing nelayan dalam membangun kemandirian dan mengembangkan potensi mereka agar dapat mencapai kemakmuran. Sebagai fasilitator, pemerintah harus memberikan akses dan dukungan yang diperlukan oleh nelayan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Teori peran Pemerintah juga menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta dalam melakukan pemberdayaan nelayan untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan, pelatihan dan pendidikan, serta dukungan modal dan akses ke pasar yang lebih luas.

⁵⁶Sugianto, *Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Tantangan Pembangunan Di Indonesia Timur*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, teori peran Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan dan kurang berkembang. Melalui peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, Pemerintah dapat membantu nelayan untuk mengambil kontrol atas hidup dan masa depan mereka, serta mencapai kemakmuran yang lebih baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvira Ramdayanti “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang” adapun hasil penelitiannya Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan berdasar kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam. Peran Pemerintah juga sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat nelayan diberikan pelatihan, pembinaan, sarana dan prasarana, dan juga asuransi bagi nelayan. Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang bisameningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya.⁵⁷

Persamaan penelitian ini adalah sebanding dalam arti bahwa keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, dan penelitian tersebut dilakukan di dalam Dinas Perikanan. Perbedaanya terletak pada wilayah pemerintahan

⁵⁷Elvira Ramdayanti “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Akreditasi Jurnal Nasional Sinta 5 ISSN 25280-1852, e-ISSN: 2721-0537 Vol VI, No.02, Desember 2021

yang berbeda dan pemberdayaan tiap daerah yang berbeda-beda. Di penelitian sebelumnya terdapat nelayan penambak garam sedangkan pada penelitian ini hanya nelayan pesisir seperti nelayan ikan dan rumput laut. Dalam penelitian ini berkaitan dengan penulis yang dimana masyarakatnya sama-sama belum sejahtera karena kondisi nelayan yang mempunyai penghasilan rendah merupakan permasalahan yang sering terjadi, namun masalah ini belum dapat diselesaikan hingga kini. Pemberdayaan nelayan sangat penting dilakukan dan Pemerintah harus berperan penting untuk memberdayakan masyarakatnya. Pemerintah telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksanannya kegiatan pemberdayaan nelayan, tetapi masih ada nelayan yang kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya yang berada di bawah garis kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan diperlukan peran Pemerintah yang lebih agar masyarakat lebih termotivasi dalam meningkatkan perekonomiannya. Kemudian dalam hal ini, peran Pemerintah juga sudah berjalan baik dengan memberikan pelatihan, pembinaan maupun bantuan yang di butuhkan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan para nelayan.

2. Hambatan yang di Hadapi Pemerintah dalam Melakukan Pemberdayaan Nelayan Diwilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

Hambatan yang dihadapi pemerintah yaitu masyarakat kadang kurang memperhatikan program-program atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah karena sebagian dari mereka ada yang tidak memahami dari apa yang telah disampaikan.

Adapun hambatannya yaitu gaya hidup konsumtif dimana ketika ada banyak pendapatan mereka tidak menyimpannya untuk di masa paceklik yang akan tiba mereka tidak memikirkan untuk kedepannya, tidak menabung sebagian dari pendapatan yang diterimanya. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan, anggaran memegang peranan penting sebagai faktor penggerak kelancaran seluruh kegiatan yang dilakukan oleh elemen lembaga pemerintahan. Kendati demikian, keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala yang dapat menghambat program pemberdayaan nelayan dan belum memenuhi sepenuhnya kebutuhan nelayan.

Kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo sangat rendah karena mayoritas nelayan hanya memiliki pendidikan SD atau SMP bahkan ada yang tidak tamat sekolah. Mereka hanya mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan lanjutan. Selain itu, pola kehidupan yang kurang produktif juga berkontribusi pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan. Meskipun nelayan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, keadaan ini tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Harry Hikmat Pemberdayaan masyarakat tidak lengkap

tanpa memperhatikan pembangunan manusia sebagai komponen pekerjaan yang harus dilakukan.⁵⁸



⁵⁸Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2001), 34

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pemberdayaan nelayan wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, maka diperoleh kesimpulan dari peran Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo adalah Peran Pemerintah terhadap pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo adalah, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan baik melalui pemberian bantuan peralatan penangkapan ikan, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir dan lain sebagainya. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan yang ada di wilayah pesisir.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo adalah yang pertamarendahnya kualitas sumber daya manusia dimana banyak diantara masyarakat pesisir yang tidak berpendidikan atau hanya tamatan SD saja kemudian yang kedua keterbatasan anggaran dimana pemerintah tidak memberikan menyeluruh bantuan untuk para nelayan karena

anggaran yang dimiliki tidak dapat mencakup semua nelayan yang ada di Kota Palopo.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian dan dukungan untuk sektor perikanan dan nelayan, terutama di daerah-daerah terpinggirkan dan kurang berkembang. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam penyediaan peralatan dan infrastruktur yang diperlukan oleh nelayan, serta memberikan akses ke pasar yang lebih luas.
2. Pemerintah perlu mengembangkan program pemberdayaan nelayan yang komprehensif, dengan fokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, peningkatan keterampilan, modal, dan teknologi, serta membangun kelembagaan dan jaringan sosial yang kuat dan berkelanjutan.
3. Bagi nelayan untuk rutin mengikuti pelatihan atau pemberdayaan dari Pemerintah untuk meningkatkan edukasi Sumber Daya Manusia terkhususnya bagi para nelayan.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian di wilayah pesisir lain agar untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan dan meningkatkan peran Pemerintah dalam memajukan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asia, Skripsi: *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Peningkatan Penghasilan Tani Tambak Di Dusun Ujung Tanah Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Palopo: IAIN 2016)
- Bambang Dan Masyur Effendi, 1998 *Paradigma Strategi Dan Langkah Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan*, Surabaya LKS
- Basrowi dan Suwandi, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Damanhuri, D. Dan L. Arianto, 1995, *Dimensi Sosial Ekonomi Dalam Kerangka Pembangunan Masyarakat Pesisir, Makalah Pertemuan Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.
- Departemen Agama RI *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung Cv-Penerbit J-ART, 2005)
- Departemen agama RI, *Al- Jumanutul 'Ali Al- Qur'an dan terjemahannya* (Bandung :CV-Penerbit J-ART, 2005)
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditma 2005)
- Fahmi Arumsi Dalam Ini'matul Huda "Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusamedia, 2012
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2001)
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2001)
- Hermanto, *Analisis Pendapatan Dan Pencurahan Tenaga Kerja Nelayan Di Desa Pantai Studi Kasus Di Muncara Bayuwangi* (Jakarta : Pusat Penelitian Agro Ekonomi Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, 1986)
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Humaniora Utama Press, 2001.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Prakasa 2013)
- Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2018)

- Mahadin Shaleh, Muhammad Hafid Fadillah “Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Bara Kota Palopo “ Journal Of Institution And Shariah Finance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah, Vol 3, No. 1 (2020)
http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/view/145/1082 (03 Oktober 2023)
- M. Khalil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 2002)
- M. Munandar Soeleman, *Ilmu Sosial Dasar: Teori Dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001)
- Marlina Rajab, Skripsi: Analisis Peran Pemerintah I Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Maje , Iakassar: Universitas Hasanuddin 2021)
- P. Joko Subagyo, S.H, “*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- P. Joko Subagyo,S.H, “*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan. Surabaya LKS
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil
- Pius A Paranto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001)
- Portal Resmi Pemerintah Kota Palopo, “Profil, Geografis”
<https://palopokota.go.id/page/geografis> (17September 2022)
- S. Nasution, *Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sumadyo Samsu, *Strategi dan Teknik Pembelajaran Membaca* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

- Syaukani, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Jakarta: Pustaka P
2009)
- Taliziduhu, Ndraha, *Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011)
- Taufik, “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar”, *Jurnal
Ilmu Pemerintahan* Vol. 6, No. 1 : 61
- Titin Purnama Sari, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Nelayan Guna Meningkatkan Ekonomi Di Dusun Lauwo Pantai
Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*, 2020.
- Totok Mardikanto, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta:
Universitas Pers, 2010)
- Totok Mardikato, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta:
Universitas Pers, 2010)
- Wikipedia, “Pesisir” <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesisir>, (17 Januari 2020).
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dan Metode Teknik*,
(Bandung: Tarsito, 1990)
- Yunita, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi islam* (Jakarta: Rajawali
Pers, 2011)
- 

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Instrumen Wawancara

A. Wawancara Kepada Kepala Lurah Penggoli

1. Bagaimana sejarah berdirinya kelurahan penggoli?
2. Apa visi misi dari kelurahan penggoli?
3. Apa saja program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat nelayan?
4. Apakah program pemberdayaan nelayan diberikan seperti pelatihan, penyuluhan?
5. Apakah kelompok nelayan semua mendapatkan bantuan dari pemerintah?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program pemberdayaan?

B. Wawancara Kepada Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan

1. Bagaimana peran Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir?
3. Dalam bentuk apa saja program pemberdayaan yang telah diberikan oleh masyarakat nelayan?
4. Bagaimana prosedur sehingga program pemberdayaan tersebut tersalurkan ke masyarakat nelayan yang ada di pesisir?
5. Apa saja tujuan pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah di wilayah pesisir ?
6. Adakah hambatan yang di hadapi Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir?
7. Bagaimana respon, saran dan masukan masyarakat nelayan di pesisir ?

C. Wawancara Kepada Para Masyarakat Nelayan

1. Bagaimana peran Pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di pesisir?

2. Bagaimana pendapat bapak terhadap program pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah?
3. Bagaimana prosedur dan operasional dalam mendapatkan bantuan pemberdayaan dari Pemerintah?
4. Apa saja bentuk bantuan nelayan yang diterima dari Pemerintah ?
5. Apakah ada hambatan yang dihadapi dalam mendapatkan bantuan dari Pemerintah ?



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

  
1 2 0 2 2 1 9 0 9 0 5 3 5

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI **IZIN PENELITIAN**
NOMOR : 535/IP/DPMPPTSP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Optika Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pimping Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR HIQMA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Baru Tanjung Ringgit Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0401 0062

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN WARA UTARA KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KECAMATAN WARA UTARA KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 30 Mei 2022 s.d. 30 Juli 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 31 Mei 2022
a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
2. Walikota Palopo
3. Danjim 1433 EWG
4. Kapires Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 3 Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Nurlaeli, S.Pt., MP

Jabatan : Kepala Badan Dinas Perikanan Kota Palopo

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur hiqma

Nim : 17 0401 0062

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul " Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana semestinya

Palopo, 25 Juli 2022

Yang menerangkan


Hj. Nurlaeli, S.Pt., MP

Nip :1976007 200003 2 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Asri Yusuf, S.Sos
Jabatan : Kepala Kelurahan Penggoli

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur hiqma
Nim : 17 0401 0062
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul " Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana semestinya

Palopo, 30 Juni 2022

Yang menerangkan



Muh. Asri Yusuf, S.Sos

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Marding

Alamat : Penggoli

Jabatan/Pekerjaan : Ketua kelompok bukkang suji

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur hiqma

Nim : 17 0401 0062

Prodi : Ekonomi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “ Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo “

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana semestinya

Palopo, 27 Juli 2022

Yang menerangkan



H. Marding

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirsan

Alamat : Penggoli

Pekerjaan : Nelayan

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur hiqma

Nim : 17 0401 0062

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul " Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana semestinya

Palopo, 27 Juli 2022

Yang menerangkan



Mirsan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamka

Alamat : Penggoli

Pekerjaan : Nelayan

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur hiqma

Nim : 17 0401 0062

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul " Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk digunakan sebagaimana semestinya

Palopo, 27 Juli 2022

Yang menerangkan



Hamka

Lampiran 4 Dokumentasi

Dokumentasi Skripsi



Dokumentasi dengan bapak Muh. Asri Yusuf, S.Sos selaku kepala kelurahan penggoli (dokumentasi pada tanggal 30 Juni 2022)



Dokumentasi dengan ibu Hj. Nurlaeli, S.Pt.,MP selaku Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo (dokumentasi pada tanggal 25 Juli 2022)

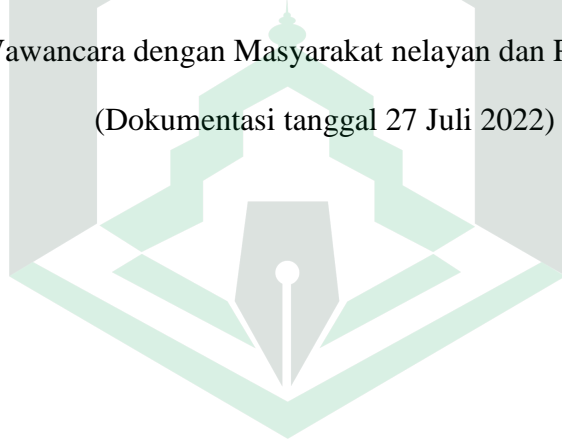






Wawancara dengan Masyarakat nelayan dan Penyuluh

(Dokumentasi tanggal 27 Juli 2022)



Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Nur Hiqma

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu `alaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Hiqma

NIM : 17 0401 0062

Program Studi : Ekonomi Syariah

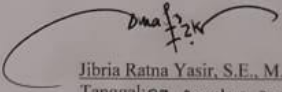
Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu `alaikum wr. wb

Pembimbing


Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si.
Tanggal: 07 Agustus 2023

Lampiran 6 Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

"Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir
Kecamatan Wara Utara Kota Palopo"

Yang ditulis oleh:

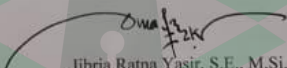
Nama : Nur Hiqma
Nim : 17 0401 0062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik layak
untuk di ajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 07 Agustus 2023

Pembimbing,


Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si.
NIP. 19850805 201903 2 008

Lampiran 7 Nota Dinas Tim Verifikasi/Turnitin

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Nur Hiqma

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu `alaikum wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Hiqma

NIM : 17 0401 0062

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

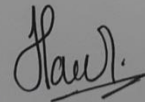
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

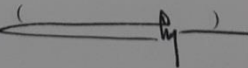
Wassalamu `alaikum wr. Wb

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
Tanggal: 19 Agustus 2023

()

2. Kamriani, S.Pd.
Tanggal: 31 Agustus 2023



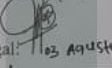
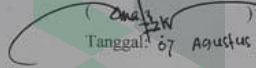
()

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

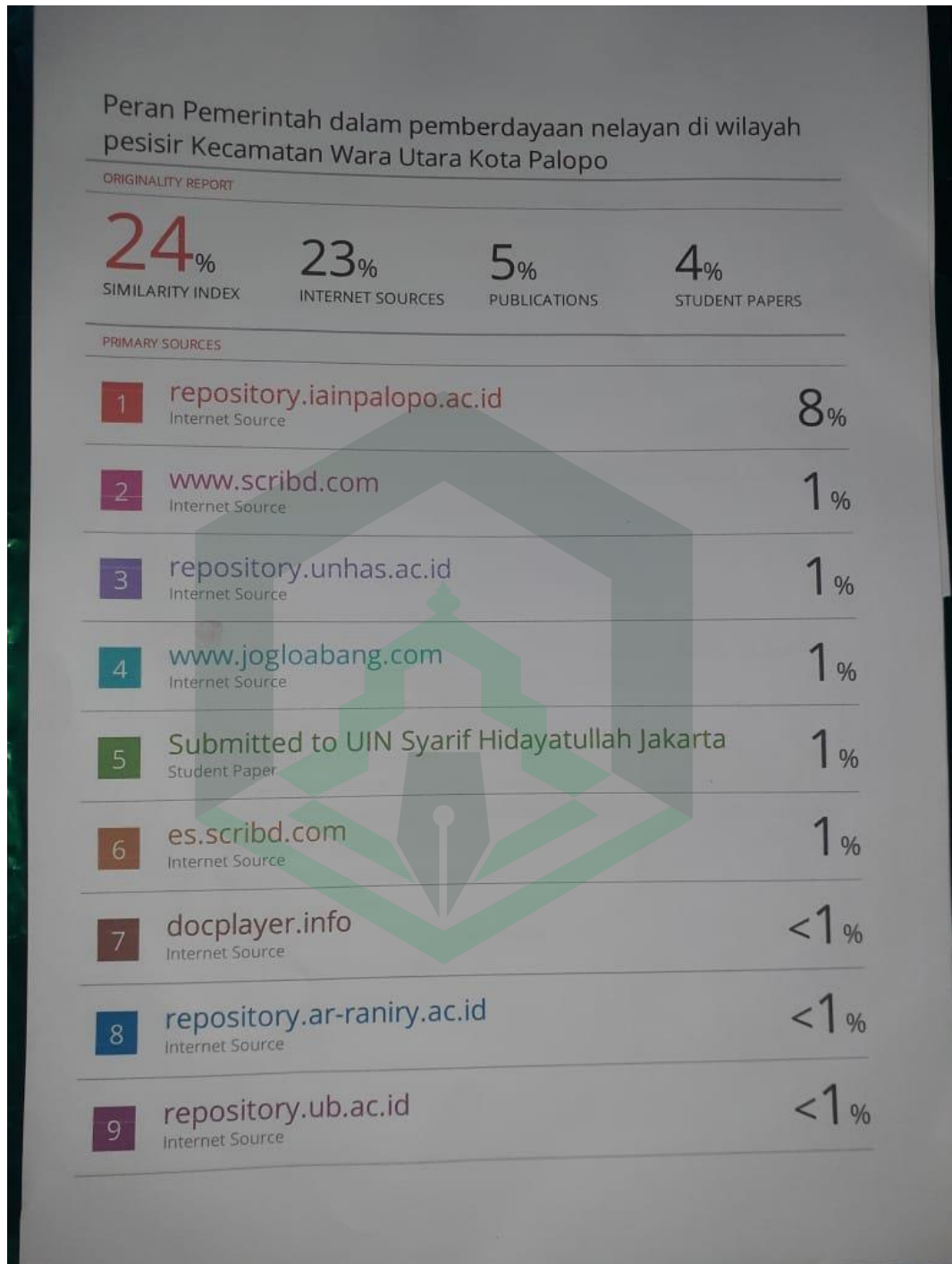
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang ditulis oleh Nur Hiqma Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0062, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 bertepatan dengan 30 Dzulqad'ah 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI.
Ketua sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Fasiha, M.EI.
Penguji I | ()
Tanggal: 07 Agustus 2023 |
| 3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.
Penguji II | ()
Tanggal: 03 Agustus 2023 |
| 4. Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si.
Pembimbing/Penguji | ()
Tanggal: 07 Agustus 2023 |

Lampiran 9 Hasil Cek Turnitin



Riwayat Hidup



Nur Hiqma, adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Pombakka pada tanggal 12 Juni 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 9 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Syaipulla dan ibu bernama Nurlia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Baru Tanjung Ringgit, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 142 Pombakka. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Palopo hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Palopo, semasa sekolah di SMK penulis aktif dalam organisasi PMR (Palang Merah Remaja) Penulis mengikuti lomba praktek pertolongan pertama dan drama yang diadakan di stadion Lagaligo Kota Palopo. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person penulis :nurhiqma98@gmail.com